‘ilmu politik dan pendidikan ips’ Perkembangan demokrasi indonesia

Najuah(2010128120006)

***Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin***

Abstrak

Demokrasi lahir karena persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, mulai dari deklarasi amerika 1776 dan prancis 1789. Demokrasi konsep pembangunan, sesuai dengan perubahan konstitusi yang berlaku secara konseptual, setiap konstitusi membentuk pengertian dan tata tertib demokrasi mengikuti visi pembuat konstitusi. Secara historis, penerapan demokrasi konsep telah banyak berubah. Konvensi kengaraan telah mengubah konsep demokrasi kontraksi berkali-kali. Negara memiliki aturan dominan untuk pelaksanaan demokrasi oleh pelaksana negara konfigurasi dengan politik. Pemikiran secara dasar untuk demokrasi serta menubah konsep dan konsitusi.

PENDAHULUAN

Prinsip sebuah negara demokrasi adalah menjunjung tinggi konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat di perlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Permasalahan yang muncul yaitu bagaimana prinsip dan jaminan hak negara menurut UUD 1945 dan bagaimana dinamika sosial dalam sistem demokrasi di indonesia. Mode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kepustakaan hukum yudiris normatif yaitu penelitian terhdap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri peraturan perundangan dan literatur untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan di bahas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus di laksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan paraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapasitas agar tetap berjalan pada semestinya dan tidak merugikan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Konsep Demokrasi Dalam Suatu Negara Hukum

Pemahaman antara demokrasi dan negara hukum tidak dapat di pisahkan, karena keduanya saling terkait dan bahkan sebagai prasyarat bahwa negara hukum adalah negara yang demokrasi karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara di lakukan dengan musyawarah (ecclesial), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelegaraan negara. Kemudian muncul teori kedaulatan yang monistis, yaitu teori kedaulatan untuk menopang paham negara dengan kekuasaan mutlak. Inti konsep ini adalah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dan dapat memaksakan perintahnya. Konsep ini menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari raja berupa penindasan terhadap hak HAM, sehingga mendapat reaksi dan tantangan dari aliran pluralis politik yang menyangkal kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas dari negara (penguasa negara).

Prinsip dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai suatu pendapat. Bahkan undang-undang baru seperti undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum pendekar sdemokrasi saja dianggap mengakebiri kebebasan berpendapat. Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men"justifikasi" fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanay melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sanksi yang di dapat hanyalah sanksi sosial. Yaitu kebebasan berpendapat ataupun mneemukakan.

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut ni'matul huda, dalam bukunya yang berjudul ilmu negara jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi ada 2 fakta historis yang penting pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beraga jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrat. Namun, apa yang di katakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda subtansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan

demokrasi sejarah eropa abad ke-20 sendiri mengmbarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan di jaga.

1. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959

Demokrasi masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamasikan dan mulai berlaku dalam undang-undang dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara asia lain. Undang-undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta mentrinya yang membunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar dan beberapa yang kecil. Koalisi ternyata tidqk berjalan dengan baik dan partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Umumnya, sehingga kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1995 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Namun, pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang teekait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri.

2. Demokrasi Terpimpin Periode1959-1965

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik dalam parktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distrosi terhadap praktik demokrasi. Dekrit presiden 5 juli dapat di pandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu untuk mencari jalan keluar dari dari penyimpanga parktik demokrasi. Begitu pula dalam undang-undang dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-krangnya selama 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengatakan ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan selama lima tahun. Banyak terjadi penyimpangan pada pratik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya presiden di beri wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam UU No 19/1964, di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan perturan tata tertib presiden nomor 14/1960 dalam hal anggota dewan perwakilan rakyat tidak mencapai manfaat. Demokrasi terpimpin soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari soekarno berakhir dengan lahirnya gerakan 30 septembwr PKI (G3SPKI).

3. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. Landasan formil periode ini adalah pancasila, UUD 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Untuk meluruskan dari penyelewengan terhadap undang-undang dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPPS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah di batalkan dan jabatan presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun. Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Maka dari itu demokrasi pada saat ini disebut demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama semua rakyat. Untuk itu pemerintah itu patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, “demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.

4. Demokrasi Periode Reformasi

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) di tandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia di Indonesia yaitu:

- a. Di berikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Berlakunya sistem multipartai, diberlakukan ini terlihat pada pemilihan umum 1999. Masa ini kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.

Karakteristik periode reformasi merupakan Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka hak-hak dasar warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

SIMPULAN

Demokrasi adalah konsep politik yang menjadi pilihan sistem politik di berbagai negara dunia ketiga pada 2 dasawarsa terakhir. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet di tahun 1989, semakin menambah popularitas demokrasi sebagai ideologi politik. Konsep demokrasi dianggap mampu dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik yang dihadapi berbagai negara. Agar akselerasi praktek demokratisasi dapat ditingkatkan, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan peningkatan kepekaan pemerintah. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi dan kegagalan demokrasi dapat dihindari.

REFERENSI

- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Kaban, R. (2000). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 158-169.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127.
- Purnamawati, E. (2020). PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Eklof, S. (2004). *Power and political culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and the decline of the New Order (1986-98)*. Routledge.
- Thamrin, M. H., Dewi, E., Ridho, H., & Salam, R. S. (2017, December). Model Legislative Candidate Recruitment In Province (Case Study in Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle on North Sumatera Province and Central Java, 2014). In *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*. Atlantis Press.